



Judul : Rapat Dengan Kementerian PUPR : Komisi V DPR Tanya Program Padat Karya
Tanggal : Sabtu, 09 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Rapat Dengan Kementerian PUPR Komisi V DPR Tanya Program Padat Karya

RAPAT pembahasan anggaran Komisi V DPR bersama Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto berlangsung alot.

Sejumlah anggota Komisi V DPR tidak terima beberapa program padat karya di sektor perumahan tidak sesuai dengan komitmen sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw langsung interupsi sebelum Dirjen Iwan membacakan materi rencana kerja di direktorat yang dipimpinnya. Apalagi Roberth menilai, bahan materi yang dibawa oleh Dirjen Perumahan ini sangat minimalis.

"Sangat minimalis, sementara kita bahas anggaran begitu besar," kata Roberth saat rapat dengan Kementerian PUPR di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Adapun agenda rapat kerja ini membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Anggota Fraksi NasDem pun mengingatkan adanya kesimpulan antara Komisi V DPR bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Bahwa, program padat karya memperhatikan usulan dan masukan dari Komisi V DPR.

"Program padat karya itu harus kembali ke komitmen kita bersama. Kembali minimal sama dengan tahun 2023," tegasnya.

Roberth lalu menyoroti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Ditjen Perumahan yang semula volumenya 45 ribu unit, namun hanya naik 10 ribu menjadi 55 ribu unit. Jumlah ini jauh dari kesepakatan.

"Maka menurut saya, kita tidak terlalu berikan waktu lama.

Mending kita skor, kita minta koordinasi terkait komitmen ini bagaimana. Kalau tidak, kami tolak. Karena kesepakatan tertera di dalam kesimpulan rapat kita tempo hari bahwa dikembalikan minimal 2023," tegasnya.

Sementara, Pimpinan sidang yang juga Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan tata tertib pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan komisi dan juga persetujuan fraksi.

"Jadi melekat kewenangan komisi, juga melekat kewenangan fraksi. Jadi ketika beda pendapat, nanti kita tanya semua fraksi," tegasnya.

Lasarus bilang, mengenai kesepakatan yang termuat dalam kesimpulan rapat 30 Agustus lalu, sudah disampaikan ke Dirjen Perumahan. Namun, sebaiknya pemaparan Dirjen Iwan mengenai rencana kerja anggaran di Ditjen Perumahan didengarkan dulu. Termasuk mengenai program kerakyatan yang dipertanyakan para anggota.

"Supaya (rapat) ini berjalan seperti yang kemarin-kemarin. Biarkan rapat ini berlangsung, nanti kan siang (Kamis siang) kita raker dengan Pak Menteri. Di raker kita sampaikan," sarannya.

Lasarus mengatakan, usulannya ini hanya demi memastikan bahwa agenda rapat kerja ini tidak terganggu. Apalagi raker bersama mitra ini merupakan hari terakhir agenda pembahasan APBN.

Namun Roberth Rouw *keukeuh*, meminta raker bersama Dirjen Perumahan dan SDA Kementerian PUPR in diskors. Skors sidang ini memberi kesempatan kepada Dirjen Iwan untuk komunikasi dengan Menteri Basuki terkait komitmen kesepakatan di rapat sebelumnya. ■ KAL